

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menjaga kepentingan nasional negara-negara saling bekerja sama untuk menghindari konflik, di era sekarang kerjasama dapat terjadi di banyak sektor tidak hanya pada sektor politik dan ekonomi tetapi juga di bidang pendidikan. Hal ini terjadi pada negara- negara Asia Tenggara termasuk hubungan antara Indonesia dan Malaysia, kerjasama Indonesia-Malaysia ini sudah terjalin sejak yang pada awalnya merupakan negara yang sering bersitegang seperti perebutan pulau Sipadan dan Ligitan, tertangkapnya nelayan Malaysia di perairan Indonesia, bahkan banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak resmi juga banyak dari mereka yang mengalami kekerasan fisik dari sang majikan (Effendi, 2013).

Seiring berjalannya waktu, hubungan diplomasi antara kedua belah negara kian membaik dengan peran masing-masing pemerintah negara seperti di Malaysia terdapat lembaga khusus untuk mempromosikan pendidikan ke berbagai negara termasuk Indonesia melalui EMGS (*Education Malaysia Global Services*) yang secara aktif memasarkan institusi pendidikan tinggi mereka melalui kampanye “Ayo Kuliah di Malaysia” dan pada 2024 telah diadakan di empat wilayah Indonesia termasuk Jawa, Kalimantan, Pontianak dan Sumatera yang telah diikuti oleh 50 perguruan tinggi Malaysia menghadirkan lebih dari 10.000 pengunjung. EMGS dan Kementerian Agama Indonesia memberikan peluang untuk dosen dapat melanjutkan pendidikan di

Malaysia (EMGS, 2024).

Di era sekarang kerjasama Indonesia-Malaysia dilakukan melalui beberapa jalur diplomasi salah satunya melalui *Citizen diplomacy* dengan mobilitas mahasiswa internasional. Mobilitas mahasiswa internasional merupakan salah satu bentuk interaksi lintas negara yang semakin berkembang dalam konteks globalisasi pendidikan tinggi. Program pertukaran mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan saja, tetapi juga membuka ruang interaksi sosial antara masyarakat dari negara satu dan yang lain (Suardi I. A., 2024).

Indonesia merespons tantangan tersebut dengan peluncuran kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diluncurkan pada tahun 2020. Hal ini ada pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberi hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi hingga maksimal tiga semester di luar program studi/luar perguruan tinggi luar negeri (KEMENDIKBUDRISTEK, 2022). Kebijakan ini menjadi langkah strategis negara dalam internasionalisasi yang menjadi sebuah keharusan bagi seluruh perguruan tinggi (Huedo, 2022).

Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (kemendikbudristek RI) berguna untuk mempersiapkan karir yang komprehensif bagi mahasiswa/i agar dapat mengasah kemampuan sesuai dengan bidang yang mereka minati dengan terjun langsung ke lingkungan. Kegiatan akan mendapat konversi SKS, Berbagai macam eksplorasi pengetahuan dan kemampuan selama satu semester, belajar memperluas jaringan

diluar kampus, dan mendapat ilmu baru dari universitas mitra. Dalam kerangka MBKM, internasionalisasi pendidikan tinggi diwujudkan melalui program dari kemdikbudristek seperti IISMA, IISMA Vokasi, dan ICT (kemdikbud, n.d.)

International Credit Transfer (ICT) merupakan salah satu program MBKM yang memberikan fasilitas kepada mahasiswa Indonesia akses untuk mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi luar negeri dan memberikan konversi kredit sebesar 20 sks saat kembali ke universitas asalnya. Program ini memungkinkan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman akademik, penguatan *soft skill*, menghubungkan akademisi antarnegara dan memperluas jejaring internasional sebagai persiapan menghadapi tantangan global (KEMENDIKBUDRISTEK, 2022). Namun, meski ICT berada dibawah naungan MBKM universitas di Indonesia diberikan kewenangan untuk secara mandiri menjalin kerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri. ICT disini tidak secara langsung mendapat mitra dari pemerintah namun, pihak universitas sendiri yang menjalin hubungan kerjasama dengan universitas di luar negeri (*institution to institution*), secara langsung universitas berperan besar dalam mencari, memilih, dan menyepakati mitra internasional lalu pemerintah sendiri berperan pada fasilitas nya (OIA UGM, 2023).

Selain ICT, terdapat program unggulan MBKM skema *student exchange* yaitu *Indonesian International Student Mobility* (IISMA) yang sempat ramai beberapa waktu lalu dan merupakan program beasiswa pertukaran pelajar dari Indonesia oleh Kemendikbud Ristek yang sama dengan ICT mendapat jaminan konversi 20 SKS

selama 1 semester (UMS, n.d.). Bedanya mahasiswa IISMA dapat memilih universitas mitra yang sudah tertera pada University list program IISMA mulai dari universitas dari Eropa, Australia, Selandia Baru, Amerika, Kanada, hingga yang terdekat Asia (Telkom University, 2024). Sedangkan ICT mendapatkan *Host University* dari kerjasama antar universitas namun tetap dibawah naungan MBKM.

Menariknya, meskipun program ICT berada di dalam skema kebijakan yang sama dengan program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yakni skema mobilitas mahasiswa internasional dengan konversi kredit sebesar 20 SKS dan pengalaman studi di luar negeri, ICT relatif kurang mendapatkan perhatian publik dibandingkan dengan *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA). Hal ini dikarenakan IISMA mendapatkan pendanaan penuh, kuota peserta yang diberikan juga besar dan daftar universitas mitra yang telah ditentukan pemerintah serta informasi yang secara merata kepada masyarakat luas sehingga memiliki peminat yang tinggi di kalangan mahasiswa.

Sementara itu, ICT juga memberikan pengalaman akademik internasional, konversi kredit, serta peluang interaksi lintas budaya, cenderung kurang terekspos karena pelaksanaannya lebih berbasis kerjasama institusi (*institution-to-institution*) dan bergantung pada jejaring masing-masing perguruan tinggi. Meskipun dalam beberapa skema pendanaan ICT tidak sepenuhnya ditanggung pemerintah seperti IISMA, program ini tetap menyediakan fasilitas konversi SKS, dukungan akademik, serta pengalaman pembelajaran internasional yang tidak kalah signifikan. Namun,

sejauh ini tidak ada data pasti terkait jumlah data peminat serta kuota untuk ICT secara nasional karena program ini kembali lagi ke institusi.

Kondisi ini menjadikan ICT menarik untuk dikaji lebih dalam, karena di balik visibilitas yang lebih rendah dibandingkan IISMA, program ini justru memperlihatkan dinamika kerja sama antar universitas dan peran mahasiswa yang lebih otonom dalam membangun relasi lintas negara. ICT tidak hanya dapat dipahami sebagai program akademik, tetapi juga sebagai ruang praktik hubungan internasional non-negara yang berlangsung secara lebih organik dan institusional. Juga setelah ditiadakannya IISMA sejak terakhir di tahun 2024, ICT memiliki peluang peminat lebih besar.

Pemerintah sebagai aktor utama melalui Kemendikbudristek, berperan sebagai fasilitator kebijakan, penyedia pendanaan, dan pembuat regulasi, lalu perguruan tinggi negeri/swasta Indonesia sebagai pencari dan penentu mitra luar negeri, penyusun kurikulum konversi kredit, sekaligus pelaksana program kemudian, perguruan tinggi luar negeri mitra di Malaysia, negeri maupun swasta sebagai penyedia mata kuliah, dan fasilitas pembelajaran dan aktor utama yaitu mahasiswa yang menjalankan pertukaran dan menjadi jembatan interaksi antar masyarakat kedua negara. Hal serupa juga dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada yang memperoleh dana hibah bantuan ICT dan secara aktif mengembangkan jejaring kerja sama internasional dengan berbagai universitas internasional memanfaatkan program yang ada (OIA UGM, 2023).

Program *International Credit Transfer* antara universitas di Indonesia dan

universitas di Malaysia, merupakan interaksi komunikasi langsung antara masyarakat kedua negara, terutama mahasiswa dan akademisi, yang berkontribusi pada peningkatan saling pengertian dan hubungan Indonesia-Malaysia, tanpa harus melibatkan jalur diplomasi formal dari pemerintah. Selaras dengan teori *Citizen diplomacy* yang dikemukakan oleh Paul Sharp bahwa *Citizen diplomacy* dalam praktik saat ini tidak lagi dimonopoli oleh negara, melainkan melibatkan aktor non-negara yang melakukan komunikasi lintas batas dengan kelompok masyarakat tertentu. Konsep *citizen diplomacy* mengacu pada partisipasi warga dalam aktivitas diplomasi yang tidak secara langsung berkaitan dengan pejabat atau aktor resmi negara namun, tetap ada kontribusi negara di dalamnya (Mutmainah, 2014).

Meskipun ICT dirancang sebagai program akademik, dalam praktiknya mahasiswa yang mengikuti program ICT tidak hanya menjalankan fungsi sebagai peserta perkuliahan, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, akademisi, serta lingkungan sosial di negara tujuan. Interaksi tersebut menciptakan komunikasi lintas budaya yang bersifat informal, relasional, dan berlangsung pada tingkat *grassroot*. Dalam konteks inilah ICT tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai ruang praktik *citizen diplomacy* yang dijalankan oleh aktor non-negara melalui hubungan *people-to-people*.

Program *International Credit Transfer* (ICT) melalui hubungan *people-to-people* menciptakan pengalaman internasional tidak hanya bagi mahasiswa Indonesia melainkan juga bagian mahasiswa lokal di negara tujuan. Dalam konteks Malaysia,

kehadiran mahasiswa Indonesia di lingkungan kampus membuka peluang terbentuknya interaksi sosial, akademik, serta pertukaran budaya dengan mahasiswa Malaysia sebagai penerima interaksi tersebut. Hubungan yang terbangun melalui aktivitas perkuliahan, diskusi kelompok, kegiatan organisasi, maupun kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus berpotensi membentuk pemahaman baru di antara kedua kelompok mahasiswa.

Adanya interaksi tersebut menjadi penting karena hubungan Indonesia-Malaysia dalam sejarahnya tidak selalu berjalan harmonis dan kerap diwarnai stereotip serta kesalahpahaman antar masyarakat di kedua negara. Dalam hal ini, mobilitas mahasiswa internasional melalui program ICT berperan menjadi ruang untuk melihat bagaimana persepsi mahasiswa Malaysia terhadap Indonesia dengan menunjukkan perubahan setelah interaksi langsung dengan mahasiswa Indonesia. Penelitian ini menyoroti pengalaman mahasiswa Indonesia yang menjalankan program pertukaran pelajar sebagai pelaku *citizen diplomacy* serta mengeksplorasi bagaimana interaksi mahasiswa Malaysia yang dengan mahasiswa Indonesia selama pelaksanaan program.

Dalam konsep *citizen diplomacy*, aktor seperti mahasiswa dapat menjalankan fungsi *citizen diplomat* melalui interaksi langsung yang bersifat relasional dan berjangka panjang tanpa bertujuan menyampaikan pesan politik secara langsung (Mutmainah, 2014). Pada program ICT ini, universitas di Indonesia dan Malaysia sebagai aktor non-negara sementara mahasiswa sebagai aktor utamanya dalam menjalankan kegiatan. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan yang banyak dipilih

oleh perguruan tinggi Indonesia dalam pelaksanaan ICT. Pemilihan Malaysia sebagai mitra didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, baik dari sisi akademik, geografis, maupun sosial-budaya. Dalam sistem pendidikan tinggi di Malaysia juga dinilai memiliki standar akademik yang sebanding dan diakui secara internasional. Malaysia secara proaktif mempromosikan dirinya sebagai pusat pendidikan internasional di Asia Tenggara.

Program-program seperti pameran pendidikan dan promosi oleh *Education Malaysia Global Services (EMGS)* yang merupakan lembaga di bawah kementerian pendidikan tinggi Malaysia di luar negeri bertujuan menarik pelajar dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan menampilkan keunggulan universitas-universitas Malaysia, biaya studi yang kompetitif, serta dukungan visa yang memadai bagi mahasiswa internasional (The Star, 2025). Banyak perguruan tinggi Indonesia, baik negeri maupun swasta, menjalin kerja sama dengan universitas di Malaysia karena kemudahan penyesuaian kurikulum, pengakuan mutu akademik, serta kedekatan geografis yang mendukung mobilitas mahasiswa. Pemilihan Malaysia sebagai fokus studi juga memungkinkan penelitian ini menggali lebih dalam bagaimana program *International Credit Transfer* berkontribusi terhadap *citizen diplomacy* Indonesia melalui interaksi lintas batas antara mahasiswa kedua negara.

Konsep *citizen diplomacy* menjelaskan bahwa warga negara dapat berperan dalam membangun hubungan luar negeri melalui interaksi langsung dengan warga negara lain. Melalui interaksi interpersonal atau *face-to-face interaction*, warga biasa

dapat membantu menciptakan pemahaman, mengurangi prasangka, serta membangun relasi yang kondusif di tingkat akar rumput (*grassroots*) (Kompasiana, 2022). Dalam pandangan Sherry Mueller, setiap individu memiliki hak bahkan kewajiban untuk membantu pembentukan hubungan luar negeri negaranya melalui hubungan antar warga negara yang disebut sebagai “*one hand at a time*”. Artinya, hubungan internasional tidak hanya dibentuk oleh diplomat resmi, tetapi juga melalui relasi sosial yang dijalankan oleh masyarakat. Sementara itu, Paul Sharp menilai bahwa keterlibatan warga dalam diplomasi dapat dipahami melalui berbagai tipologi peran, yang menunjukkan bahwa individu dapat bertindak sebagai agen independen maupun sebagai pembawa nilai tertentu dalam ruang internasional (Kompasiana, 2022)

Pada kajian-kajian sebelumnya, hubungan Indonesia-Malaysia umumnya berfokus pada peran negara, kebijakan luar negeri, serta upaya penyelesaian konflik dan penguatan kerja sama antar pemerintah (Effendi, 2013). Penelitian lain juga menempatkan kerja sama pendidikan sebagai bagian dari kebijakan negara dalam membangun citra dan kepercayaan bilateral. Sementara itu, kajian mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mobilitas mahasiswa lebih banyak menyoroti aspek kebijakan dan implementasi akademik. Namun, masih sangat terbatas penelitian yang mengkaji *International Credit Transfer* (ICT) sebagai praktik *Citizen diplomacy* di bidang pendidikan dengan menekankan peran aktor non-negara, khususnya universitas dan mahasiswa, komunikasi lintas batas, serta pembentukan hubungan sosial antar masyarakat, terutama dengan menggunakan perspektif Paul Sharp dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia. Karena itulah, penelitian ini

hadir untuk mengeksplorasi bagaimana ICT diimplementasikan dan terhadap *Citizen diplomacy* Indonesia dalam konteks kerja sama perguruan tinggi dengan mitra di Malaysia pada periode 2022-2024.

Program *International Credit Transfer (ICT)* yang menjadi objek penelitian ini dilaksanakan oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dengan berbagai universitas mitra di Malaysia. Mengingat skema kerja sama, nama program, serta pendanaan yang berbeda di setiap institusi, berikut disajikan gambaran umum program ICT 2022-2024 yang menjadi dasar penelitian ini:

Tabel 1.1.1 Tabel Program Narasumber ICT

<u>Narasumber</u>	<u>Universitas Asal</u>	<u>Universitas Mitra</u>	<u>Nama Program</u>	<u>Tahun</u>	<u>Pembiayaan</u>
<u>Pandu Putra Ritonga</u>	<u>Universitas Jenderal Soedirman</u>	<u>Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)</u>	<u>Student International Mobility Program (SIMP)</u>	2022	<u>Partial funded</u>
<u>Fahrul Razi</u>	<u>UPN Veteran Jawa Timur</u>	<u>Universiti Teknologi MARA (UITM)</u>	<u>ICT</u>	2023	<u>Fully funded (Belmawa)</u>
<u>Muhammad Irfan Fauzan R</u>	<u>UPN Veteran Jawa Timur</u>	<u>Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)</u>	<u>ICT</u>	2024	<u>Partial funded</u>
<u>Harits Wildansyah K. S.</u>	<u>UPN Veteran Jawa Timur</u>	<u>Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)</u>	<u>ICT</u>	2024	<u>Self-funded</u>
<u>Asma Nadzifa</u>	<u>Universitas Negeri Jember</u>	<u>Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)</u>	<u>International Credit Transfer Program (ICTP)</u>	2024	<u>Partial funded</u>
<u>Zidnya N. Qonita</u>	<u>UPN Veteran Yogyakarta</u>	<u>Universiti Malaya</u>	<u>ICT</u>	2024	<u>Partial funded</u>
<u>Talisa Rahmawati</u>	<u>Universitas Muhammadiyah Pringsewu</u>	<u>Management and Science University (MSU)</u>	<u>ICT</u>	2024	<u>Partial funded</u>
<u>Najma Auly</u>	<u>UPN Veteran Yogyakarta</u>	<u>Universiti Malaya</u>	<u>ICT</u>	2025	<u>Partial funded</u>

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara, 2026

Penulis menganalisis beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan kesamaan topik yang memiliki kesamaan topik. Pertama artikel berjudul “*Evaluation of the Implementation of the International Credit Transfer Program of Makassar State University*” oleh Suardi dkk tahun 2024. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program ICT dari aspek akademik, budaya, dan pengalaman mahasiswa. Dalam studi ini ditemukan bahwa ICT mendorong interaksi lintas budaya, adaptasi sosial, serta komunikasi antar mahasiswa dan institusi pendidikan dari negara berbeda. Penelitian ini tidak secara langsung membahas *citizen diplomacy* justru menunjukkan bahwa ICT menciptakan interaksi *people-to-people* yang berkelanjutan melalui jalur pendidikan sekaligus evaluasi program.

Kedua, Mutmainah (2014) dalam “Demokratisasi dalam Diplomasi?: Sebuah Tinjauan terhadap Konsep dan Fungsi “*Citizen diplomacy*” menyatakan bahwa *citizen diplomacy* merupakan partisipasi warga biasa dalam hubungan internasional melalui interaksi langsung dengan pihak luar yang berkontribusi terhadap pembentukan relasi lintas negara tanpa mandat resmi negara (Mutmainah, 2014).

Ketiga, Hanada, S. (2022) dalam artikel berjudul “*International higher education in citizen diplomacy: Examining student learning outcomes from mobility programs*” menjelaskan bahwa mobilitas mahasiswa internasional tidak hanya berperan dalam pertukaran mahasiswa tetapi juga proses pembentukan hubungan antar masyarakat dalam hal ini mahasiswa internasional berfungsi sebagai aktor relasional yang membangun goodwill, kepercayaan dan pemahaman antarbangsa. Mahasiswa internasional seringkali dipersepsikan sebagai representasi negaranya dan

berperan sebagai informal ambassador melalui interaksi sosial dan akademik. Namun, studi tersebut tidak spesifik membahas *citizen diplomacy* tipologi Paul Sharp namun, memandang dalam kerangka *soft power* dan *people-to-people diplomacy* (Hanada, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai Penelitian terdahulu lebih banyak meneliti implementasi program *International Credit Transfer* dari sisi operasional dan pengalaman akademik mahasiswa, sementara kajian yang melihat fenomena ini sebagai praktik hubungan internasional non-negara khususnya melalui *citizen diplomacy* masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menganalisis praktik *citizen diplomacy* mahasiswa Indonesia sebagai aktor non-negara melalui program ICT di Malaysia pada periode 2022-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dipilih oleh penulis untuk menganalisis Program *International Credit Transfer* “Bagaimana Praktik *Citizen diplomacy* Mahasiswa Indonesia melalui Program *International Credit Transfer* (ICT) di Malaysia (2022-2024)?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian Umum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis praktik *citizen diplomacy* Mahasiswa Indonesia melalui program ICT di Malaysia periode 2022-2024.

Selain itu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di UPN Veteran Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis cantumkan maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan *student exchange International Credit Transfer* baik dari mahasiswa Indonesia juga mahasiswa Malaysia dan menganalisis implementasi *International Credit Transfer* sebagai instrumen *Citizen diplomacy* Indonesia di Malaysia dengan menekankan peran aktor non-negara.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 *Citizen diplomacy*

Konsep *citizen diplomacy* berkembang seiring dengan banyaknya partisipasi masyarakat dalam aktivitas hubungan internasional. Konsep ini muncul sebagai salah satu pendekatan yang menjelaskan peran warga negara dan menekankan bahwa seolah-olah orang awam (*layman*) bisa menjalankan fungsi diplomatik. Gagasan tersebut muncul karena banyaknya aktivitas diplomasi yang melibatkan warga negara. Namun, keterlibatan warga negara biasa dalam diplomasi tentunya tidak lepas dari keterlibatan negara (Mutmainah, 2014).

Menurut Sherry Mueller tentang *citizen diplomacy* setiap individu memiliki hak bahkan kewajiban untuk membantu pembentukan hubungan luar negeri negaranya disebut sebagai “*one hand-at a time*” karena kegiatan tersebut dijalani oleh warga

negara dengan warga negara yang berbeda asal negara. Melalui *citizen diplomacy* warga negara mempermudah jalannya pemerintahan dengan level *grassroots* agar kondusif dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri. Melalui interaksi antar warga negara secara langsung (*face-to-face interactions*), pelaksana program pertukaran dapat melihat secara langsung seberapa jauh kebebasan, keterbukaan, dan institusi mereka dihargai. Dalam pandangan Mueller ini, *citizen diplomacy* melihat partisipasi warga biasa sebagai bentuk bantuan untuk kepentingan luar negeri (Mutmainah, 2014).

James Marshall meragukan keterlibatan publik, karena dianggapnya membiarkan orang awam memutuskan dan mengeksekusi sebuah keputusan terkait kebijakan luar negeri. Namun, disisi lain Marshall memiliki pandangan bahwa pemikiran dan energi adalah kunci dari perdamaian. Marshall juga menjelaskan bahwa *citizen diplomacy* tidak sepenuhnya lepas dari negara, sehingga jika publik ikut serta dalam diplomasi maka seharusnya memiliki otonomi dalam penanganan isu (Mutmainah, 2014).

Jika menurut Paul Sharp, *citizen diplomacy* adalah aktivitas individu atau kelompok non-pemerintah berpartisipasi dalam proses diplomatik dengan melibatkan aktor tingkat *grassroots*, bahkan masyarakat seperti pebisnis, pemuda dan seniman dapat terlibat menjadi bagian dari perkembangan dalam kajian diplomasi. Paul Sharp memiliki tipologi berdasarkan dua dimensi yaitu yang pertama “siapa atau apa yang diwakili oleh *citizen diplomats*” yaitu diri sendiri dan negara atau kebijakan yang diwakili gagasan tertentu dan kedua “kepada siapa diplomasi itu ditujukan” menegaskan bahwa mengacu pada perwakilan dari komunitas internasional yang

menjadi target diplomasi baik aktor negara atau non-negara (Mutmainah, 2014).

1.4.2 Tipologi dalam *citizen diplomacy*

Berdasarkan penjelasan terkait *citizen diplomacy* diatas, Paul Sharp merumuskan lima tipologi yang menjelaskan beragam bentuk keterlibatan elemen masyarakat mulai dari non-formal hingga dari negara, kelima tipologi tersebut diantaranya. Pertama, *The Citizen diplomat as a go-between messenger* pada tipe ini warga negara bertindak seperti perantara atau jembatan untuk dua negara yang terkadang berada dalam situasi sensitif, konflik atau pasca konflik. Di dalam kegiatannya masih membawa kepentingan negara dengan target untuk negara. Kedua, *The citizen diplomats as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest*, tipe ini mewakili aktor sub-negara seperti daerah, sektor atau institusi tertentu dan menjadikan negara sebagai target. Tipe ini bertindak mewakili kepentingan ekonomi atau sektor tertentu. Ketiga, *citizen diplomacy as a lobbyist or advocate for a particular cause* pada tipe ini warga berperan sebagai pembela atau penyuara isu tertentu, targetnya adalah negara atau pembuat kebijakan. Keempat, *The citizen diplomat as a subverter or transformer of existing policies and/or political arrangements* di tipe ini warga berupaya melakukan perubahan kebijakan di tingkat baik domestik maupun internasional dan menargetkan komunitas internasional, NGO, organisasi masyarakat sipil. Kelima *The citizen diplomat as an autonomous agent in international relations* pada tipe ini pihak yang diwakili adalah individu itu sendiri sebagai aktor hubungan internasional menargetkan negara dan non-negara seperti warga negara lain, institusi asing, pemerintah asing, komunitas internasional, pada tipe ini warga negara bertindak tidak secara formal

namun, mewakili negara, institusi, dan nilai budaya personal, ciri utamanya tipe ini independen, tidak diarahkan secara langsung oleh negara dan representasi terjadi secara natural (Mutmainah, 2014).

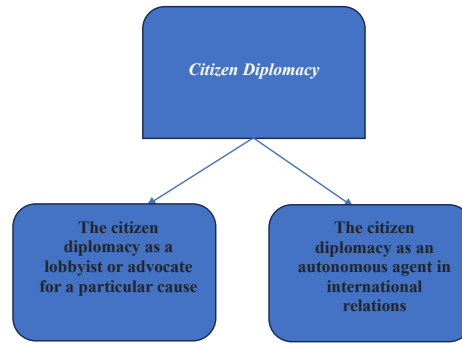
Tipe	Pihak yang diwakili	Target
The citizen diplomacy as go between messenger Warga negara bertindak sebagai perantara antara negara-negara terutama dalam situasi konflik/ketegangan diplomatik	Negara	Negara
The citizen diplomacy as a representative for a sectoral, regional, or local economic interest Warga negara mewakili kepentingan ekonomi sub-nasional dalam interaksi internasional	Aktor sub-negara	Non-negara
The citizen diplomacy as a lobbyist or advocate for a particular cause Warga negara mengadvokasi isu-isu tertentu yang bersifat universal, seperti hak asasi manusia atau lingkungan	Gagasan	Negara
The citizen diplomacy as a subverter as transformer of exciting policies and for political arrangements Warga negara berupaya mendorong perubahan kebijakan atau tatanan politik yang ada	Gagasan	Non-negara
The citizen diplomacy as an autonomous agent in international relations Individu bertindak atas nama diri sendiri dalam hubungan internasional, biasanya karena memiliki kapasitas finansial atau moral yang signifikan	Individu (diri sendiri)	Negara dan non-negara

Gambar 1.4.2.1 Tipologi *Citizen diplomacy*

Sumber: Paul Sharp (2001) dalam Mutmainah (2015)

Selanjutnya penulis hanya akan menggunakan dua tipologi yaitu *citizen diplomacy as a lobbyist or advocate for a particular cause* dan *The citizen diplomat as an autonomous agent in international relations* karena tidak ditemukan tiga tipologi lain yang selaras dengan studi kasus Praktik *Citizen diplomacy* Indonesia melalui Program *International Credit Transfer* (ICT) di Malaysia (2022-2024).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.5.1 Sintesa Pemikiran

Sumber : Ilustrasi Penulis

Berdasarkan kerangka pemikiran mengenai *citizen diplomacy*, penelitian ini menggunakan tipologi yang dikemukakan Paul Sharp sebagai alat analisis untuk memahami praktik diplomasi warga negara dalam program *International Credit Transfer* (ICT) di Malaysia periode 2022-2024. Penelitian ini fokus pada dua tipe tipologi oleh Sharp yaitu Tipe pertama, *The citizen diplomacy as a lobbyist or advocate for a particular cause*, yaitu ketika individu mewakili suatu gagasan atau nilai tertentu dan berupaya menyampaikannya kepada pihak lain, termasuk negara atau institusi di luar negeri. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai peserta ICT dapat menyampaikan representasi mengenai budaya, cara pandang, serta karakter masyarakat Indonesia. Dengan demikian, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk advokasi nilai dan identitas nasional dalam ranah hubungan internasional. Tipe kedua adalah *The citizen diplomat as an autonomous agent in international relations* ketika individu bertindak secara mandiri sebagai aktor dalam hubungan internasional tanpa secara langsung mewakili negara atau institusi. Mahasiswa diposisikan sebagai aktor independen yang

membangun relasi lintas negara melalui interaksi sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun dalam kehidupan sosial.

1.6 Argumen Utama

Penelitian ini berargumen bahwa program ICT tidak hanya memfasilitasi mobilitas akademik, tetapi menciptakan ruang diplomasi informal di mana mahasiswa berfungsi sebagai agen representasi budaya dan pembentuk relasi lintas negara. Dalam hal ini, mahasiswa yang menjalani program *International Credit Transfer* (ICT) di Malaysia rentang tahun 2022-2024 ini merupakan praktik *citizen diplomacy* dengan dua tipologi yaitu sebagai *The citizen diplomacy as a lobbyist or advocate for a particular cause* yang merepresentasikan nilai dan identitas budaya Indonesia dalam interaksi lintas negara, serta sebagai *The citizen diplomat as an autonomous agent in international relations* yang secara mandiri membangun relasi internasional melalui interaksi akademik dan sosial sehari-hari.

The citizen diplomacy as a lobbyist or advocate for a particular, mahasiswa ICT tidak hanya hadir di kelas sebagai peserta pertukaran akademik, tetapi juga membawa dan menyuarakan identitas nasional melalui praktik persembahan budaya, penggunaan pakaian simbol nasional, serta partisipasi dalam kegiatan akademik dan sosial yang memperkenalkan nilai-nilai Indonesia kepada masyarakat Malaysia seperti mengenakan pakaian bernuansa Nusantara dan persembahan budaya oleh mahasiswa Indonesia untuk membawa isu identitas nasional yang kerap terjadi di antara kedua negara. Dalam peran ini, Mahasiswa ICT menjalankan advokasi identitas

budaya Indonesia di Malaysia melalui kegiatan sehari-hari, seperti berbagi makanan khas Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dalam percakapan informal, serta keterlibatan dalam kegiatan kampus yang menampilkan budaya Nusantara. Representasi tersebut hadir melalui komunikasi interpersonal, kerja kelompok akademik, dan partisipasi dalam aktivitas kampus yang membentuk pemahaman mahasiswa Malaysia terhadap budaya Indonesia.

Pada *The citizen diplomat as an autonomous agent in international relations*, mahasiswa ICT bertindak sebagai individu yang membangun hubungan internasional secara langsung melalui pengalaman hidup, komunikasi, dan partisipasi dalam kegiatan kampus maupun masyarakat. Praktik ini tidak selalu bersifat formal atau terkoordinasi oleh negara, melainkan terbentuk melalui interaksi natural yang menciptakan pemahaman dan kedekatan antarmasyarakat kedua negara. Praktik ini, tidak luput dari peran pemerintah karena ICT merupakan salah satu bentuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan peran sebagai penyusun regulasi, pendanaan, dan kerjasama antar perguruan tinggi lintas negara.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen kebijakan, serta laporan dan publikasi resmi yang relevan dengan topik penelitian

yang diangkat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program dari Indonesia serta beberapa narasumber dari mahasiswa lokal Malaysia yang berinteraksi langsung selama menjalankan program.

Penulis memilih studi kasus deskriptif karena dianggap paling sesuai untuk memahami secara mendalam fenomena Praktik *Citizen diplomacy* Indonesia Di Bidang Pendidikan studi kasus Program *International Credit Transfer* dengan universitas di Malaysia pada periode 2022-2024.

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis fenomena empiris tersebut, peneliti berharap dapat menjawab rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana Praktik *citizen diplomacy* Indonesia di bidang pendidikan dijalankan melalui Program *International Credit Transfer* dengan universitas di Malaysia pada tahun 2022-2024.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian berfungsi sebagai batasan yang ditetapkan dalam proses penelitian dan batasan data yang diperlukan agar lebih fokus dan terstruktur. Jangkauan penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tahun 2022 hingga 2024. Alasan penulis memilih tahun penelitian pada rentang tahun tersebut karena program MBKM *International Credit Transfer* oleh Kemendikbud ini baru diluncurkan pada tahun 2020 namun implementasi program mobilitas mahasiswa lintas negara ICT mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaan karena adanya wabah virus Covid-19 hingga 2021 sehingga program ICT belum secara langsung dilaksanakan secara luring (*offline*) (Unipasby.ac.id, 2021). Dapat disimpulkan, pelaksanaan ICT

secara *offline* dilaksanakan mulai tahun 2022 (UMM, 2022). Pada periode ini Malaysia menjadi salah satu negara tujuan dalam pelaksanaan ICT sehingga relevan untuk dianalisis. Penelitian ini berfokus pada mahasiswa Indonesia peserta ICT di universitas mitra program ICT di Malaysia sebagai lokasi studi kasus, sehingga penelitian tidak membahas seluruh mahasiswa ICT Indonesia di Malaysia namun, fokus pada mahasiswa Indonesia pelaku ICT di universitas mitra program seperti Universiti Sultan Zainal Abidin, Universiti Malaya, Management and Science University, dan Universitas Teknologi MARA. Dengan demikian, periode 2022-2024 dinilai relevan untuk mengamati praktik *International Credit Transfer* (ICT) sebagai bentuk *Citizen diplomacy*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terbatas dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program *International Credit Transfer* (ICT) seperti pihak mahasiswa peserta program ICT di beberapa perguruan tinggi Indonesia seperti Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Jendral Soedirman, dan Universitas Negeri Jember. Juga dilakukan beberapa wawancara dengan beberapa mahasiswa lokal Malaysia yang berinteraksi langsung dengan peserta program ICT. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai proses pelaksanaan program, bentuk interaksi akademik dan sosial

yang terjadi, serta pengalaman para aktor dalam praktik *citizen diplomacy*.

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen dan sumber resmi, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen kebijakan, laporan institusi pendidikan, situs web resmi pemerintahan dan perguruan tinggi, serta berita relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut digunakan untuk memberikan konteks konseptual, kebijakan, dan empiris terkait *citizen diplomacy* selama pelaksanaan Program.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan mengacu pada konsep *citizen diplomacy* menurut Paul Sharp yang memandang diplomasi sebagai praktik relasional antar komunitas politik. Analisis difokuskan pada bentuk interaksi lintas masyarakat, dinamika relasi sosial yang terbangun, serta posisi mahasiswa sebagai aktor non-negara dalam membangun hubungan sosial Indonesia-Malaysia.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I:. Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, cakupan materi, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini membahas mahasiswa sebagai *The citizen diplomacy as a lobbyist or advocate for a particular cause* dalam praktik *citizen diplomacy* melalui program *International Credit Transfer (ICT)*. Pembahasan difokuskan pada

bagaimana mahasiswa Indonesia mengadvokasikan budaya, nilai sosial, serta aspek akademik dan intelektual Indonesia. Pada akhir bab juga dibahas perubahan persepsi dan respon mahasiswa Malaysia terhadap Indonesia sebagai hasil dari hubungan *people-to-people* yang terbentuk selama program berlangsung.

Bab III: Bab ini membahas mahasiswa sebagai *autonomous agent* dalam praktik *citizen diplomacy* melalui program *International Credit Transfer* (ICT). Pembahasan meliputi kondisi finansial, motivasi mengikuti ICT, pola interaksi, proses adaptasi, serta pengalaman individual mahasiswa selama menjalankan program di Malaysia. Dalam bab ini mahasiswa dipahami sebagai aktor yang memiliki ruang kemandirian dalam membangun relasi internasional.

Bab IV: Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.